Al Iidara Balad
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI DAERAH TEPIAN SUNGAI KECAMATAN AMUNTAI SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (STUDI KASUS DESA PADANG TANGGUL)

Ramona[1], Sri Agusmila Aneta Herlinda[2] , Selamat Riadi[3]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Email: **ramona031312@gmail.com**

ABSTRAK

Pengelolaan sampah merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh masyarakat. Banyak sungai yang mengalami pencemaran akibat sampah domestik, termasuk plastik dan limbah rumah tangga, yang berasal dari masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran sungai. Fenomena masalah yang terjadi pada Desa Padang Tanggul yakni rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kebijakan sampah, keterbatasan fasilitas persampahan**,** dan kurangnya sosialisasi ke masyarakat untuk tidak menjadikan kebiasaan membuang sampah di sungai dan tepian sungai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah di daerah tepian sungai Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Padang Tanggul) dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teori implementasi model Jan Merse. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Sumber data diambil melalui penarikan secara *purposive sampling* berjumlah 14 informan. Kemudian di analisis menggunakan teknik analisis data Model Miles & Huberman meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Daerah Tepian Sungai Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Padang Tanggul) belum terimplementasi dengan baik. Adapun indikator yang belum baik yaitu penyaluran informasi, kejelasan informasi, sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat, kepatuhan masyarakat, pembagian wewenang dan tanggung jawab, serta komitmen. Dan indikator yang cukup baik adalah sasaran. Faktor-faktor yang menghambat dalam implementasi ini yakni: penyaluran informasi yang belum baik, keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya partisipasi masyarakat, serta kurangnya kepatuhan masyarakat. Faktor yang mendukung dalam implementasi ini yakni adanya regulasi pengelolaan sampah. Saran penelitian ini ditujukan kepada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kecamatan Amuntai Selatan, Pemerintah Desa Padang Tanggul agar meningkatkan komitmen, sosialisasi, penyediaan sarana persampahan, dan kepada masyarakat meningkatkan kesadaran, partisipasi, dan kepatuhan dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan dengan tidak membuang sampah ke sungai dan tepian sungai.

Kata Kunci:. Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah, Tepian Sungai

ABSTRACT

Was management is one of the main challenges faced by society. Many rivers are experiencing pollution due to domestik waste,including plastics and household waste, originating from communities living along the riverbanks. The phenomenon of the problem occuring in Padang Tanggul Village is the low participation of the community in supporting the implementation of waste policies, limited waste management facilities, and insufficient socialization to the public to avoid the habit of disposing of waste in rivers and along riverbanks. This study aims to examine how the implementation of waste management policies in the riverbank areas of Amuntai Selatan District, Hulu Sungai Utara Regency (Case Study of Padang Tanggul Village) is carried out and the factors that influence it. This study uses a qualitative-descriptive approach with Jan Merse's implementation model theory. The data collection techniques employed are observation, interviews, and documentation. Data sources were obtained through purposive sampling involving 14 informants. The data were then analyzed using the Miles & Huberman data analysis

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

model, which includes data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the Implementation of Waste Management Policy in the Riverbank Area of Amuntai Selatan Subdistrict, Hulu Sungai Utara Regency (Case Study: Padang Tanggul Village) has not been well implemented. The indicators that are not adequately implemented include information dissemination, clarity of information, facilities and infrastructure, community participation, community compliance, allocation of authority and responsibility, and commitment. And a fairly good indicator is the target. The factors that hinder the implementation of this include: inadequate information dissemination, limited facilities and infrastructure, lack of community participation, and lack of community compliance. The factors that support this implementation include the existence of waste management regulations. The recommendations of this study are addressed to the Department of Housing, Settlements, and Environment of Hulu Sungai Utara Regency, Amuntai Selaran District, and the Padang Tanggul Village government to enhance commitment, socialization, and the provision of waste management facilities, and to the community to increase awareness, participation, and compliance in maintaining environmental cleanliness and health by not disposing of waste into rivers and riverbanks.

Keywords**:** *Policy Implementation, Waste Management, Riverbanks*

PENDAHULUAN

Permasalahan sampah menjadi isu penting yang terjadi seiring dengan perkembangan dan aktivitas pembangunan yang terus meningkat. Sampah telah menjadi permasalahan nasional yang mengharuskan pengelolaannya dilakukan dengan pendekatan yang terpadu dan menyeluruh. Masalah sampah merupakan isu global yang semakin kompleks dan mendesak untuk diatasi. Di Indonesia, jumlah sampah terus meningkat setiap tahunnya, terutama di daerah perdesaan. Permasalahan lingkungan hidup yang seringkali menjadi sorotan masyarakat saat ini adalah mengenai sampah, permasalahan sampah yang terlihat yaitu sekarang sampah masih menjadi sumber polusi udara karena baunya dan polusi air yang dikarenakan penanganan air yang kurang tepat dan juga penyebab terjadinya wabah penyakit dan bisa menyebabkan banjir. Pengelolaan sampah merupakan tantangan utama yang dihadapi oleh masyarakat di berbagai daerah. Banyak sungai yang mengalami pencemaran akibat sampah domestik, termasuk plastik dan limbah rumah tangga, yang berasal dari masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran tepian sungai. Praktik pembuangan sampah langsung ke sungai sering terjadi karena tidak tersedianya fasilitas pengelolaan sampah yang memadai dan kurangnya perhatian dari pemerintah desa. (Nggilu *et al.*, 2020)

Berbicara mengenai masalah sampah, banyak masyarakat yang tidak mematuhi adanya aturan, khususnya daerah pinggiran sungai, masih banyak sampah yang menumpuk di tepian dan di genangan sungai dikarenakan kurangnya sarana prasarana dan kesadaran masyarakat. Dalam upaya menyelesaikan permasalahan mengenai sampah, pemerintah daerah telah mengeluarkan sebuah kebijakan melalui Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dengan tujuan memberikan solusi atas permasalahan sampah yang terjadi di lapangan. Pemerintah perlu menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat supaya membuang sampah ke sungai tidak menjadi kebiasaan. Pembuangan sampah di sungai bisa memberikan dampak buruk bagi masyarakat yang menggunakan air, selain itu apabila sungai meluap, akan banyak sampah-sampah yang sangkut di tepian sungai. Peraturan daerah yang seharusnya dilaksanakan oleh setiap orang, organisasi, maupun lembaga/instansi namun kenyataannya masih banyak yang melanggar aturan tersebut. Selain pemerintah, partisipasi masyarakat dalam hal pengelolaan sampah masih belum maksimal.

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa peneliti menemukan fenomena-fenomena berdasarkan observasi yang dilakukan, diantaranya:

1. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kebijakan sampah, yang mana masih ditemukannya praktik pembuangan sampah di sungai dan di tepian sungai oleh masyarakat.
2. Keterbatasan fasilitas persampahan, seperti kurangnya tempat sampah dan tidak tersedianya layanan angkutan sampah, sehingga masyarakat kebiasaan menumpuk sampah di tepian sungai dan membuang sampah ke sungai.
3. Kurangnya sosialisasi ke masyarakat untuk tidak menjadikan kebiasaan membuang sampah di sungai dan di tepian sungai.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah dari Atika Ariani (2023) STIA Amuntai berjudul "Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Suryatama dan Desa Sumber Agung)" dengan Teori Implementasi Donald Van Metter & Carl Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan Implementasinya belum baik terdapat 6 subvariabel dan 14 indikator, terdapat 10 indikator belum baik dan 4 indikator cukup baik. Diperkuat kembali dengan hasil penelitian oleh Mira Jayanti (2022) Universitas Pasundan "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung (Studi Kasus: Desa Banjaran)" menggunakan teori Edward II. Hasil Penelitian menyatakan bahwa komunikasi dilaksanakan, namun belum maksimal Disposisi dan struktur birokrasi sudah dilakukan cukup baik. Namun, dalam pelaksanaannya belum terlaksana dengan optimal. Sumberdaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung belum memadai.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif, yaitu dengan data atau informasi dalam penelitian kemudian diinterprestasikan dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian ataupun kesimpulan berdasarkan teori, konsep-konsep maupun logika yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan diharapkan semua itu dapat terjawab terhadap semua rumusan masalah dalam penelitian, dengan teori implementasi kebijakan model Jan Merse dalam (Affrian, 2023).

Dengan menggunakan purposive sampling, peneliti memilih 14 informan untuk dijadikan sebagai sumber data peneliti. Tenik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan Model Miles & Huberman meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2023). Uji kredibilitas data pada penelitian ini meliputi perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, dan member check (Sugiyono, 2023).

PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Daerah Tepian Sungai Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Padang Tanggul)

Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan dari kebijakan yang saling menyesuaikan proses interaksi dan memerlukan jaringan pelaksana pemerintahan serta birokrasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tingkat keberhasilan implementasi dapat diukur menggunakan teori-teori yang telah dicetuskan oleh para ahlinya, maka untuk

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

mengukur tingkat keberhasilan implementasi kebijakan ini menggunakan teori dari Jan Merse dalam(Affrian, 2023).

1. Informasi

Informasi adalah fakta yang sudah diproses dan dikelola sehingga bisa menjadi sesuatu yang mudah dipahami dan memberikan manfaat bagi penerimanya. Informasi merupakan faktor yang sangat penting dalam implementasi kebijakan, karena kurangnya informasi yang dimiliki dapat memengaruhi kebijakan itu sendiri.

a. Penyaluran Informasi

Penyaluran informasi merupakan proses penyampaian yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat dengan tujuan agar informasi tersebut dapat diterima, dipahami, dan diimplementasikan oleh masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Analisis data hasil wawancara, dan observasi mengarah pada kesimpulan bahwa penyaluran informasi dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di daerah tepian sungai Desa Padang Tanggul belum baik, hal tersebut ditunjukkan dari belum pernah diadakannya sosialisasi ke masyarakat Desa Padang Tanggul tentang kebijakan pengelolaan sampah di daerah tepian sungai, sehingga masyarakat tidak mengetahui kebijakan pengelolaan sampah dan juga tidak tahu tujuan dari kebijakan pengelolaan sampah tersebut.

Hal ini tidak sesuai dengan teori Jan Merse dalam Affrian (2023:47-48) yang menjelaskan ada 4 sub variabel implementasi salah satunya adalah informasi yang berindikator penyaluran informasi dikategorikan belum baik. Informasi merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Keterbatasan informasi yang dimiliki oleh masyarakat maupun pelaksana kebijakan dapat memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan tersebut. Selain itu, proses penyampaian informasi yang belum baik berpotensi menghambat pemahaman masyarakat, sehingga menimbulkan kurangnya pengetahuan dan kesadaran terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.

b. Kejelasan Informasi

Kejelasan informasi merupakan kondisi ketika informasi mengenai kebijakan, termasuk tujuan, sasaran, prosedur, dan mekanisme pelaksanaannya, dapat dipahami dengan mudah oleh pelaksana maupun masyarakat sasaran.

Analisis data hasil wawancara, dan observasi mengarah pada kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di daerah tepian sungai Desa Padang Tanggul kejelasan informasi belum baik, karena di Desa Padang Tanggul tidak ada spanduk tentang kebijakan sampah dan juga spanduk larangan buang sampah sembarangan khususnya di sungai dan tepian sungai, serta belum pernah diadakan sosialisasi masalah pengelolaan sampah tersebut, sehingga pemahaman masyarakat masih terbatas karena belum terdapat media yang dapat meningkatkan kesadaran dan mengingatkan masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai dan tepian sungai.

Hal ini tidak sesuai dengan teori Jan Merse dalam Affrian (2023:47-48) yang menjelaskan ada 4 sub variabel implementasi salah satunya adalah informasi yang berindikator kejelasan informasi dikategorikan belum baik, karena belum tersedianya media informasi berupa spanduk atau sarana sosialisasi lainnya. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat mengalami keterbatasan dalam memperoleh

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

informasi yang jelas mengenai tujuan, ketentuan, dan prosedur yang berkaitan dengan kebijakan tersebut.

2. Isi Kebijakan

Isi kebijakan adalah substansi atau muatan utama yang terdapat dalam suatu kebijakan. Isi kebijakan menjelaskan apa yang akan dilakukan, tujuan yang ingin dicapai, sasaran yang dituju, aturan yang diterapkan, serta mekanisme pelaksanaannya.

a. Sasaran

Sasaran adalah target yang menjadi tujuan utama penerima manfaat maupun pelaksana dari suatu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sasaran penting untuk memastikan bahwa ketepatan manfaat dan tujuan kebijakan dapat diterima serta dirasakan secara optimal oleh masyarakat yang menjadi target kebijakan.

Analisis data hasil wawancara, dan observasi mengarah pada kesimpulan bahwa sasaran dalam kebijakan pengelolaan sampah cukup baik. Hal ini karena sasaran kebijakan telah ditetapkan dengan jelas, yaitu masyarakat sebagai pengelola sampah dan penerima manfaat kebijakan. Namun, pada implementasinya masih terdapat kendala berupa rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat, hal tersebut dikarenakan kurangnya komunikasi seperti sosialisasi tentang kebijakan kepada masyarakat, sehingga sebagian masyarakat tidak mengetahui isi kebijakan.

Hal ini sesuai dengan teori Jan Merse dalam Affrian (2023:47-48) yang menjelaskan ada 4 sub variabel implementasi salah satunya adalah isi kebijakan yang berindikator sasaran dikategorikan cukup baik. Sasaran penting untuk memastikan bahwa ketepatan manfaat dan tujuan kebijakan dapat diterima serta dirasakan secara optimal oleh masyarakat yang menjadi target kebijakan.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah alat dan fasilitas pendukung yang harus ada agar sebuah kebijakan atau layanan publik bisa berjalan.

Analisis data hasil wawancara, dan observasi mengarah pada kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di daerah tepian sungai Desa Padang Tanggul sarana dan prasarana masih kurang, yang mana belum terpenuhi secara maksimal, seperti tempat sampah yang minim, untuk tempat sampah tidak semua ada, sekitar 1 tempat sampah untuk 2-3 rumah dan tidak tersedianya angkutan sampah yang mengangkut sampah. Sehingga membuat masyarakat Desa Padang Tanggul masih membuang sampah ke sungai dan tepian sungai.

Hal ini tidak sesuai dengan teori Jan Merse dalam Affrian (2023:47-48) yang menjelaskan ada 4 sub variabel implementasi salah satunya adalah isi kebijakan yang berindikator sarana dan prasarana dikategorikan masih kurang, karena fasilitas pengelolaan sampah belum tersedia secara maksimal.

3. Dukungan Masyarakat

Dukungan masyarakat penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan karena berkaitan dengan tingkat keterlibatan dan partisipasi masyarakat sebagai kelompok sasaran maupun pemangku kepentingan.

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

a. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung, melaksanakan, dan memberikan kontribusi terhadap suatu kebijakan pemerintah.

Analisis data hasil wawancara, dan observasi mengarah pada kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di daerah tepian sungai Desa Padang Tanggul partisipasi masyarakat masih kurang, sehingga belum optimal pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal ini ditunjukkan dari kurangnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung pengelolaan sampah, baik dalam mendukung rencana pengangkutan sampah maupun berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan, dan juga kurangnya dukungan dalam melaksanakan tindakan yang sejalan dengan kebijakan pengelolaan sampah seperti ditemukannya masyarakat yang masih membuang sampah ke sungai dan di tepian sungai.

Hal ini tidak sesuai dengan teori Jan Merse dalam Affrian (2023:47-48) yang menjelaskan ada 4 sub variabel implementasi salah satunya adalah dukungan masyarakat yang berindikator partisipasi masyarakat dikategorikan masih kurang. Kondisi tersebut terlihat dari kurangnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung pengelolaan sampah, baik dalam mendukung rencana pengangkutan sampah maupun berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan. Partisipasi masyarakat menekankan pentingnya keterlibatan dan dukungan masyarakat dengan tindakan nyata terhadap pelaksanaan kebijakan.

b. Kepatuhan Masyarakat

Kepatuhan masyarakat merupakan tingkat kesediaan dan ketaatan masyarakat dalam mengikuti serta melaksanakan dengan patuh ketentuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan.

Berdasarkan analisis data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa kepatuhan masyarakat Desa Padang Tanggul dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah kurang patuh, yang mana masyarakat belum patuh pada aturan, karena masyarakat Desa Padang Tanggul masih membuang sampah ke sungai dan tepian sungai. Dengan tidak adanya layanan angkutan sampah juga menjadikan masyarakat kebiasaan membuang sampah ke sungai dan tepian sungai. Hal ini terlihat dari adanya penumpukan sampah di tepian sungai Desa Padang Tanggul.

Hal ini tidak sesuai dengan teori Jan Merse dalam Affrian (2023:47-48) yang menjelaskan ada 4 sub variabel implementasi salah satunya adalah dukungan masyarakat yang berindikator kepatuhan masyarakat dikategorikan kurang patuh. Kepatuhan masyarakat menunjukkan sejauh mana masyarakat mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan.

4. Pembagian Potensi

Pembagian potensi merupakan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada setiap pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan sesuai dengan kapasitas, fungsi, dan perannya masing-masing.

a. Pembagian Wewenang dan Tanggung Jawab

Pembagian wewenang dan tanggung jawab merupakan proses penetapan serta pembagian tugas, kewenangan, dan tanggung jawab kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

Analisis data hasil wawancara, dan observasi mengarah pada kesimpulan bahwa pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah sudah bagus dari Dinas Perkim-LH, mereka menjalankan tugas sesuai dengan bidang nya masing-masing. Tapi di Desa Padang Tanggul belum ada pembagian wewenang dan tanggung jawab karena belum ada pengelolaan sampah yang terstruktur. Pelaksanaan pengelolaan sampah di desa masih belum memiliki sistem yang terorganisasi dengan baik, belum terdapat petugas khusus, struktur kerja, maupun pembagian tugas yang jelas dalam kegiatan pengelolaan sampah di lingkungan Desa Padang Tanggul.

Hal ini tidak sesuai dengan teori Jan Merse dalam Affrian (2023:47-48) yang menjelaskan ada 4 sub variabel implementasi salah satunya adalah pembagian potensi yang berindikator pembagian wewenang dan tanggung jawab dikategorikan belum terlaksana di Desa Padang Tanggul.

b. Komitmen

Komitmen merupakan kesediaan dan kesungguhan untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab, serta tujuan yang telah ditetapkan secara konsisten guna mencapai hasil yang diharapkan

Analisis data hasil wawancara, dan observasi mengarah pada kesimpulan bahwa komitmen dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di daerah tepian sungai Desa Padang Tanggul belum baik. Meskipun Dinas Perkim-LH telah menunjukkan komitmen melalui kegiatan sosialisasi dan pemberian arahan kepada pemerintah desa, namun komitmen tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan di tingkat desa. Selain itu, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada komitmen dan keseriusan pemerintah desa dalam menindaklanjuti arahan dari pemerintah daerah. Pemerintah Desa Padang Tanggul masih belum mampu merealisasikan pengelolaan sampah secara nyata karena terkendala keterbatasan anggaran dana desa serta belum adanya prioritas terhadap pengelolaan sampah.

Hal ini tidak sesuai dengan teori Jan Merse dalam Affrian (2023:47-48) yang menjelaskan ada 4 sub variabel implementasi salah satunya adalah pembagian potensi yang berindikator komitmen dikategorikan belum berjalan dengan baik. Komitmen diperlukan agar pelaksana kebijakan memiliki kesungguhan dan konsistensi dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan.

B. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Daerah Tepian Sungai Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Padang Tanggul)

1. Faktor Penghambat

Dalam sebuah penelitian pasti ada beberapa hal yang mendukung tercapainya hasil penelitian tersebut, namun juga terdapat beberapa faktor yang menghambatnya. Berikut ini dijelaskan mengenai faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan pengelolaan sampah di daerah tepian sungai Desa Padang Tanggul.

a. Penyaluran Informasi yang belum baik

Berdasarkan hasil penelitian, penyaluran infornasi yang belum baik menjadi faktor yang menghambat implementasi kebijakan pengelolaan sampah di daerah tepian sungai

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

Desa Padang Tanggul. Hal tersebut karena pemerintah belum melaksanakan sosialisasi secara rutin mengenai kebijakan pengelolaan sampah di daerah tepian sungai, sehingga sebagian masyarakat belum memahami keberadaan, tujuan, dan pentingnya kebijakan tersebut.

Temuan tersebut tidak sejalan dengan teori Jan Merse dalam Affrian (2023). Penyaluran informasi yang belum baik dapat menghambat pemahaman masyarakat terhadap kebijakan, sehingga berakibat pada rendahnya partisipasi dan juga kepatuhan masyarakat dalam mendukung kebijakan pengelolaan sampah

b. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di daerah tepian sungai Desa Padang Tanggul yakni keterbatasan sarana prasarana. Fasilitas pendukung pengelolaan sampah, seperti tempat sampah, belum tersedia dalam jumlah yang memadai, dan juga di desa Padang Tanggul belum terdapat layanan pengangkutan sampah. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat masih membuang sampah ke sungai dan tepian sungai sebagai pembuangan yang mudah dilakukan.

Temuan ini menunjukkan bahwa aspek sarana dan prasarana sebagai bagian dari isi kebijakan belum terpenuhi secara maksimal. Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan teori Jan Merse dalam Affrian (2023) yang menyatakan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu unsur penting dalam implementasi kebijakan. Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan.

c. Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Hasil penelitian pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah di daerah tepian sungai Desa Padang Tanggul menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih kurang, yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan kebijakan tersebut. Kondisi ini ditunjukkan oleh kurangnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung pengelolaan sampah, baik melalui dukungan terhadap rencana pengangkutan sampah maupun partisipasi aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, masih ditemukan masyarakat yang membuang sampah ke sungai dan tepian sungai, yang menunjukkan belum adanya dukungan nyata terhadap pelaksanaan kebijakan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori Jan Merse dalam Affrian (2023) yang menyatakan bahwa dukungan masyarakat, khususnya melalui partisipasi aktif penting dalam implementasi kebijakan. Kurangnya partisipasi masyarakat dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan karena keberhasilan implementasi sangat bergantung pada keterlibatan dan dukungan masyarakat dalam pelaksanaannya.

d. Kurangnya Kepatuhan Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian, kepatuhan masyarakat kurang terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di daerah tepian sungai Desa Padang Tanggul. Kondisi ini ditunjukkan oleh masih ditemukannya masyarakat yang masih membuang sampah ke sungai dan tepian sungai, sehingga terjadi penumpukan sampah di beberapa titik kawasan tepian sungai. Selain dipengaruhi oleh rendahnya kepatuhan terhadap ketentuan yang

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

berlaku, perilaku tersebut juga dipengaruhi oleh belum tersedianya layanan pengangkutan sampah yang memadai. Temuan ini menunjukkan bahwa salah satu faktor yang menghambat implementasi kebijakan pengelolaan sampah di daerah tepian sungai yakni kurangnya kepatuhan masyarakat.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori Jan Merse dalam Affrian (2023) yang menyatakan bahwa kepatuhan masyarakat merupakan salah satu indikator dukungan masyarakat dalam implementasi kebijakan. Tingkat kepatuhan yang kurang dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan.

2. Faktor Pendukung

Berdasarkan analisis hasil penelitian, implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Hulu Sungai Utara telah memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 74 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Keberadaan regulasi tersebut menjadi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di daerah tepian sungai Desa Padang Tanggul karena memberikan landasan hukum, arah kebijakan, strategi serta pedoman bagi pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan sampah. Dengan adanya regulasi tersebut, pemerintah desa memiliki acuan yang jelas mengenai tugas, tanggung jawab, dan upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan sampah di wilayahnya. Pemerintah Daerah melalui Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 74 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga telah menggunakan kewenangannya untuk memberikan landasan hukum dan kejelasan tanggung jawab guna mengurangi permasalahan sampah di daerah.

Keberadaan regulasi telah memberikan kejelasan mengenai pentingnya pengelolaan sampah serta larangan melakukan tindakan yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Regulasi tersebut juga menjadi dasar dan strategi bagi pemerintah daerah untuk mendorong desa-desa melaksanakan pengelolaan sampah, termasuk pembentukan kelembagaan dan kegiatan pengurangan sampah. Meskipun implementasinya di Desa Padang Tanggul belum terlaksana dengan baik, keberadaan regulasi tetap menjadi faktor pendukung karena menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan dasar hukum bagi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah. Tanpa adanya regulasi tersebut, pelaksanaan kebijakan akan mengalami kesulitan karena tidak memiliki pedoman yang jelas dalam pelaksanaannya. Regulasi yang jelas menunjukkan bahwa isi kebijakan telah dirumuskan secara formal dan dapat dijadikan pedoman oleh pelaksana kebijakan. Namun demikian, keberadaan regulasi saja belum cukup untuk menjamin keberhasilan implementasi apabila tidak didukung oleh sosialisasi, partisipasi dan kepatuhan masyarakat, sarana dan prasarana serta komitmen pemerintah desa dalam menjalankan kebijakan tersebut.

SIMPULAN

Dengan merujuk pada hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Daerah Tepian Sungai Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Padang Tanggul) belum terimplementasi dengan baik. Hal

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

tersebut diukur menggunakan teori implementasi dari Jan Merse dalam Affrian (2023:47-48). Hal ini dapat dilihat dari: *Pertama,* informasi dengan indikator penyaluran informasi belum baik, dan pada indikator kejelasan informasi belum baik. *Kedua*, isi kebijakan dengan indikator sasaran cukup baik, pada indikator sarana dan prasarana masih kurang, yang mana belum terpenuhi secara maksimal. *Ketiga*, dukungan masyarakat dengan indikator partisipasi masyarakat masih kurang. Pada Indikator kepatuhan masyarakat kurang patuh. *Keempat*, pembagian potensi dengan indikator pembagian wewenang dan tanggung jawab belum terlaksana di Desa Padang Tanggul, dan pada indikator komitmen belum baik.

Faktor-faktor yang memengaruhi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Daerah Tepian Sungai Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Padang Tanggul) terdiri dari faktor penghambat dan faktor pendukung. Ada empat faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di daerah tepian sungai Desa Padang Tanggul. *Pertama*, penyaluran informasi yang belum baik. *Kedua*, keterbatasan sarana dan prasarana. *Ketiga*, kurangnya partisipasi masyarakat. *Keempat*, kurangnya kepatuhan masyarakat. Kemudian faktor pendukungnya adalah adanya regulasi pengelolaan sampah.

Saran dalam penelitian ini ditujukan kepada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk lebih meningkatkan penyaluran informasi dan sosialisasi mengenai kebijakan pengelolaan sampah ini khususnya di wilayah tepian sungai. Untuk Kecamatan Amuntai Selatan diharapkan dapat meningkatkan perannya dalam mendukung implementasi kebijakan pengelolaan sampah di desa melalui pembinaan, koordinasi, dan pengawasan terhadap pemerintah desa. Pemerintah Desa Padang Tanggul perlu komitmen dengan membentuk sistem pengelolaan sampah yang jelas, termasuk pembagian tugas dan tanggung jawab antara aparat desa, RT, dan masyarakat bersama-sama meningkatkan pengelolaan sampah melalui sosialisasi rutin, pemasangan media seperti spanduk larangan membuang sampah ke sungai, dan penyediaan sarana persampahan. Serta kepada masayarakat agar meningkatkan kesadaran, partisipasi, dan kepatuhan dalam melaksanakan kebijakan tersebut seperti menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan dengan tidak membuang sampah ke sungai dan tepian sungai. Dan turut serta dalam mendukung rencana pengadaan layanan angkutan sampah termasuk kesediaan berkontribusi secara finansial untuk biaya operasional pengangkutan jika diperlukan. Dan juga diharapkan agar selalu ikut serta jika nanti diadakan sosialisasi masalah sampah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 74 Tahun 2018 *Tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.*

Affrian, R. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media.

Ariani, Atika (2023) *Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Suryatama dan Desa Sumber Agung):* STIA Amuntai

Aminah, N.Z.N. & Muliawati, A. 2021. *Pengelolaan Sampah dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan (Waste Management in the Context of Waste Management).* Tersedia:

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

https://hmgp.geo.ugm.ac.id/2021/08/27/pengelolaan-sampah-dalam-konteks-pembangunan-berkelanjutan-waste-management-in-the-context-of-waste-management/ (Diakses pada 4 Mei 2026)

Agustino Leo, Ph. D. (2022) *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Dewi, D.S.K. (2022) *Buku Ajar Kebijakan Publik; Proses, Implementasi dan Evaluasi*. Yogyakarta: Samudra Biru.

Nggilu, A. *et al.* (2020) Dampak pembuangan sampah di sungai terhadap lingkungan dan masyarakat desa karya baru. *Jurnal Normalita* Vol. 10, No. 3, hlm 196-202.

Jayanti, Mira (2022) *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Desa Banjaran Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten*. Skripsi. FISIP UNPAS: Universitas Pasundan.

Kurhayadi dan Kushendar, D.H. (2023) *Kebijakan dan Pelayanan Publik*. Indramayu: Penerbit Adab

Okhtafianny, T. dan Ria, A. (2023) Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Payakumbuh. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi* Vol. 3, No. 2, hlm 537-550.

Pramono, J. (2020) *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: UNISRI Press

Sugiyono (2023) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.